

## ABSTRAK

### **PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA CIREBON DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH**

Penelitian ini membahas mengenai peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon dalam pengurusan piutang negara macet pada instansi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan sesuai dengan tugas KPKNL pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014 serta bagaimana proses tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh KPKNL dan pengurusan piutang negara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Cirebon dalam pengurusan piutang macet pada instansi pemerintah daerah serta untuk mengetahui prosedur pengurusan piutang macet instansi pemerintah daerah oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Cirebon.

Soekanto mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Maka dari itu teori yang digunakan adalah tugas pokok yaitu suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. (Muammar Himawan, 2004:8).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, serta teknik yang dilakukan adalah wawancara kepada pihak terkait langsung dengan permasalahan yang dibahas serta dianggap mampu memberikan penjelasan yang tepat.

Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya KPKNL Kota Cirebon mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang serta sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan diatas. Peranan KPKNL adalah sebagai pelaksana daripada tugas-tugas Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dimana PUPN sebagai lembaga interdepartemental, bahwa PUPN itu berada di dalam KPKNL, dimana tugas-tugas dari PUPN dalam menyelesaikan piutang negara macet secara administrasi dilaksanakan oleh KPKNL. Namun peran yang dilaksanakan oleh KPKNL Cirebon tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan secara efisien.

Kata kunci: peran, pengurusan, piutang negara.

## **ABSTRACT**

### **PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA CIREBON DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH**

*This study discusses the role of State Wealth Office and Auction Office (KPKNL) Cirebon City in the management of state receivables are stuck in government agencies based on Law No. 49 Prp Year 1960 on State Receivables Management Committee and in accordance with the duties of KPKNL in Regulation of the Minister of Finance No. 48 / PMK.06 / 2014 and how the process stages or procedures undertaken by KPKNL and the administration of the country's receivables.*

*This study aims to determine the role of State Offices of State Wealth and Auction City Cirebon in the management of bad debts at local government agencies as well as to know the procedure of handling bad debts of local government agencies by the State Property Office and Auction City Cirebon.*

*Soekanto said that the role of more refers to function, adjustment and as a process or in other words the role is a manifestation of adjustment to the position or position that belongs within a particular social system. Therefore the theory used is the main task that is an obligation that must be done, the job is the responsibility, the command to do or do something to achieve a goal. The main task as a unity of work or activity is the main and routine performed by employees in an organization that provides an overview of the scope or complexity of positions or organizations in order to achieve certain goals. (Muammar Himawan, 2004: 8).*

*This research uses qualitative and descriptive method that aims to describe phenomenon systematically, factually and accurately about the role of State Wealth Service Office, as well as techniques that are done to interview parties directly related to the issues discussed and considered capable of providing appropriate explanation.*

*In this research, it can be concluded that in carrying out its role KPKNL Cirebon City refers to the vision and mission of the Directorate General of State Assets (DJKN) which is the manager of state assets, state receivables and auctions and in accordance with the rules mentioned above. The role of KPKNL is as the executor of the tasks of the State Receivables Committee (PUPN) where the PUPN is the interdepartmental institution, that the PUPN is within the KPKNL, where the duties of PUPN in settling the state receivables are administratively stacked by KPKNL. But the role implemented by KPKNL Cirebon is not yet fully able to run efficiently.*

*Keywords: roles, handling, state receivables.*